



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14/BPPERDA/DPRD/ND/XI/2023 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi dan Koordinasi Penyusunan Propemperda Tahun 2024 tanggal 15 November 2023, telah dilakukan harmonisasi dan koordinasi bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap usulan daftar rancangan peraturan daerah untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, telah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka diperlukan landasan yuridis sebagai dasar hukum pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.1.2/01969/KUM/2023 hal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
 2. Nota Dinas Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 80/ND Komisi I/2023 perihal Penyampaian Usulan Raperda Untuk Propemperda Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
 3. Nota Dinas Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 103/Kom-II/XI/2023 perihal Penyampaian Usulan Raperda Untuk Propemperda Tahun 2024 tanggal 11 November 2023;
 4. Nota Dinas Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 49/ND/Kom-III/XI/2023;

5. Nota Dinas Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14/BPPERDA/DPRD/ND/XI/2023 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi dan Koordinasi Penyusunan Propemperda Tahun 2024 tanggal 15 November 2023
6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, hari Kamis tanggal 16 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Daftar Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud merupakan pedoman dan pengendali yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan proses Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya pengeluaran akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SUPIAN HK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR
32 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

No.	JENIS	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PERDA	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahun 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
2.	PERDA	Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Dinas Kehutanan	Tahun 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
3.	PERDA	Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
4.	PERDA	Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045		✓		Perintah Perundang- undangan yang lebih tinggi			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahun 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
5.	PERDA	Grand Desaign Pembangunan Kependudukan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Tahun 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

6.	PERDA	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	✓		Perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi			Badan Keuangan Daerah	Tahun 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
7.	PERDA	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	✓		Perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi			Badan Keuangan Daerah	Tahun 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
8.	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	✓		Perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi			Badan Keuangan Daerah	Tahun 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
9.	PERDA	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Komisi I	Tahun 2024	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
10.	PERDA	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan Ikan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Komisi II	Tahun 2024	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
11.	PERDA	Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Komisi II	Tahun 2024	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
12.	PERDA	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Komisi II	Tahun 2024	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
13.	PERDA	Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Komisi III	Tahun 2024	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

14.	PERDA	Penyelenggaraa Perlindungan Pengelolaan Ekosistem gambut		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			Komisi III	Tahun 2024	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
15.	PERDA	Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah			BP Perda	Tahun 2024	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SUPIAN HK